

ANTROPOLOGI INDONESIA

Indonesian Journal of Social and Cultural Anthropology

▣ **Makna Kultural Mitos dalam Budaya
Masyarakat Banten**

▣ **Kekuasaan Politik dan Adat Para Mosalaki
di Desa Nggela dan Tenda, Kabupaten Ende, Flores**

▣ **Politik Etnisitas dalam Pemekaran Daerah**

**Vol. 33 No. 3
September-Desember
2012**

ANTROPOLOGI INDONESIA Vol. 33 No. 3 September-Desember 2012



Departemen Antropologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Indonesia

Dewan Penasihat

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Indonesia

Ketua Departemen Antropologi,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

Ketua Pusat Kajian Antropologi,
Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Indonesia

Pemimpin Redaksi

Tony Rudyansjah

Redaksi Pelaksana

Dian Sulistiawati, Irwan M. Hidayana, Dave Lumenta.

Manajer Tata Laksana

Imam Ardhianto

Administrasi dan Keuangan

Sri Paramita Budi Utami

Sekretaris

Sarah Monica, Shabrina, Astrid Puspitasari

Distribusi dan Sirkulasi

Febrian

Pembantu Teknis

Geger Riyanto, Amira Waworuntu, Muhammad Damm

Dewan Redaksi

Achmad Fedyani Saifuddin, Universitas Indonesia

Birgit Bräuchler,, University of Frankfurt

Boedhi Hartono, Universitas Indonesia

Engseng Ho, Duke University

Greg Acciaioli, University of Western Australia

Heddy Shri Ahimsa Putra, Gadjah Mada University

Martin Slama, Austrian Academy of Sciences

Meutia F. Swasono, Universitas Indonesia

Kari Telle, Chr. Michelsen Institute

Ratna Saptari, University of Leiden

Semiarto Aji Purwanto, Universitas Indonesia

Suraya Afiff, Universitas Indonesia

Timo Kaartinen, University of Helsinki

Yasmine.Z. Shahab, Universitas Indonesia

Yunita.T. Winarto, Universitas Indonesia

Daftar Isi

ANTROPOLOGI INDONESIA VOL. 33 NO. 3 2012

Makna Kultural Mitos dalam Budaya Masyarakat Banten Ayatullah Humaeni	159
Kekuasaan Politik dan Adat Para Mosalaki di Desa Nggela dan Tenda, Kabupaten Ende, Flores J. Emmed M. Priyoharyono	180
Politik Etnisitas dalam Pemekaran Daerah Fikarwin Zuska	203
Pengelolaan Sumber Daya Laut Kawasan Terumbu Karang Takabonerate dan Paradigma Komunalisme Lingkungan Masyarakat Bajo Masa Lalu Munsi Lampe	216
Puisi Lisan Masyarakat Banda Eli Ketahanan Budaya di Maluku setelah Perang Pala Timo Kaartinen	228

Pengelolaan Sumber Daya Laut Kawasan Terumbu Karang Takabonerate dan Paradigma Komunalisme Lingkungan Masyarakat Bajo Masa Lalu

Munsi Lampe¹

Universitas Hasanuddin

Abstrak

Tulisan ini bertujuan memahami kompleksitas interaksi Orang Bajo dengan lingkungan laut terumbu karang dalam wujud pengelolaan sumber daya laut Kawasan Takabonerate di masa lalu melalui aplikasi paradigma komunalisme dalam ekologi manusia/antropologi ekologi. Masalahnya adalah bagaimana mengonstruksi kompleksitas interaksi komunitas Nelayan Bajo dengan lingkungan lautnya dalam konteks sistem kepercayaan, kelembagaan sosial-ekonomi dan politik di masa awal keberadaan mereka di Kepulauan Takabonerate hingga periode 1940-an. Material penulisan diambil dari data penelitian lapangan—diperoleh dengan wawancara mendalam dan pengamatan—sesuai dengan fokus studi dan pilihan pendekatan. Lokasi penelitian meliputi seluruh Kawasan Takabonerate dengan desa-desa pulau yang berpusat di Pulau Rajuni sebagai pusat Kerajaan Bajo masa lalu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sumber daya laut berasosiasi terumbu karang oleh Masyarakat Bajo masa lalu berbasis pada Kelembagaan Panglima Menteng yang dicirikan dengan tatanan kehidupan kolektif (sosial-ekonomi-politik) yang kuat dan rapi; pola-pola pemanfaatan sumber daya laut yang mencerminkan hubungan antar subjektif manusia-lingkungan; kondisi kesejahteraan sosial-ekonomi penduduk yang merata; dan terjaganya kondisi kelestarian lingkungan dan keseimbangan sumber daya laut terumbu karang.

Kata kunci: pengelolaan sumber daya terumbu karang, Masyarakat Bajo, paradigma komunalisme.

Abstract

This article aims to analyze the complexity of interactions between Bajo fishermen communities and their sea environment in the form of coral reef resource management in Takabonerate in the past time by application of the paradigm of communalism in human ecology. The question proposed is how to construct the complexity of the interaction between Bajo fishermen communities and their sea environment in the context of belief systems, and socio-economic and political institutions in the early time of their arrival in Takabonerate archipelago up to the of 1940s. The article's material are taken from field research reports in which the data/information was gained by depth interviews and observation according to the focus of study and the chosen approach. The Bajo fishermen communities under study are concentrated in the village of Rajuni Island (as the center of the old Bajo Kingdom). This analysis indicates that the management patterns of sea environment and coral reef resource use applied by Bajo fishernen communities of Takabonerate are based on models of the great Panglima Menteng institution. The management is characterized by strong collective order; the sea resource use management reflects the intersubjective relations between human societies and natural/sea environment spirits; equity of household socio-economic welfare; the constantly controlled condition of environment and the balanced natural resource use .

Keywords: management of coral reef resource use, Bajo community, communalism paradigm.

¹ Dr. Munsi Lampe M.A., staf pengajar pada Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hassanudin, Makassar.
E-mail: munsi_lampe@yahoo.com

Pendahuluan

Studi sosial budaya Masyarakat Bajo di Indonesia sudah banyak dilakukan oleh para peneliti sosial budaya dan sejarah sejak dahulu, baik peneliti dari luar maupun dari dalam negeri. Melalui studi literatur diketahui bahwa kajian Masyarakat Bajo di Nusantara selama ini lebih fokus pada aspek-aspek sejarah dan asal usul, pengembaraan dan pencarian hasil-hasil laut di daerah perairan berkarang, afiliasi dan adaptasi dengan kerajaan-kerajaan setempat yang didatangi, dan etnografi klasik–pelukisan secara holistik tentang unsur-unsur kehidupan yang bersahaja¹. Sebaliknya masih kurang adanya kajian ekologi manusia/antropologi ekologi yang mau menganalisis fenomena interaksi antara komunitas-komunitas pelaut ini dengan lingkungan lautnya. Kajian justru menjadi menarik dan penting–dari sisi kemanfaatan akademik dan praktis–ketika dihubungkan dengan isu nasional pengelolaan lingkungan laut yang mengalami kerusakan ekosistem terumbu karang dan kemerosotan sumber daya berasosiasi dengannya. Apalagi ketika kasus-kasus kerusakan ekosistem terumbu karang dan kemerosotan populasi dari berbagai spesies biota bernilai ekonomi tinggi seringkali atau selalu dihubungkan dengan praktik-praktik Orang Bajo yang destruktif berupa penggunaan bahan peledak dan bahan kimia beracun serta pengambilan batu karang².

Jika praktik-praktik Orang Bajo terbukti benar menyumbang pada kerusakan ekosistem terumbu karang dan pelangkaan spesies-spesies biota laut tertentu, pertanyaan yang segera muncul ialah (1) apakah praktik destruktif tersebut memang sudah menjadi tradisi dalam kehidupan sosial-ekonomi mereka sejak awal keberadaannya sebagai suku bangsa laut? Atau (2) apakah praktik-praktik seperti itu baru terpolakan sejak beberapa periode berikutnya sebagai

akibat dari pengaruh kekuatan sosial-ekonomi dan politik eksternal? Dalam konteks Orang Bajo Indonesia secara keseluruhan, kedua pertanyaan tersebut tidak mudah terjawab disebabkan kurang tersedianya data/informasi penelitian ekologi manusia yang valid dan terpercaya untuk itu. Lain halnya kalau merujuk pada hasil penelitian Masyarakat Bajo yang menempati beberapa daerah pesisir dan pulau-pulau berciri ekosistem terumbu karang, misalnya antara lain: Kawasan Takabonerate (Sulawesi Selatan), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Togian (Sulawesi Tengah). Pada komunitas-komunitas Desa Bajo di kawasan-kawasan tersebut biasanya masih tersimpan keterangan atau cerita rakyat yang dapat menggambarkan secara utuh tentang tatanan berkehidupan bersama yang mantap dan pola-pola pemanfaatan sumber daya lingkungan laut secara seimbang dalam kaitan dengan pranata-pranata sosial-ekonomi, politik, dan kepercayaan.

Demikianlah dengan menggunakan data/informasi dalam laporan penelitian dari tahun 1997/1998, 2000/2001, dan 2004 mengenai komunitas-komunitas Nelayan Bajo Kawasan Takabonerate–semuanya dilakukan dalam rangka *Coremap (Coral Reep Rehabilitation and Management Program)*–diperoleh banyak keterangan yang dinilai cukup memadai untuk menjawab pertanyaan yang diajukan di muka. Segenap keterangan tersebut membuktikan bahwa sejak periode 1970-an aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan Bajo dan Bugis kebanyakan menggunakan bom dan busur dari bahan kimia beracun (*potassium sianida*). Dari keterangan itu pula diketahui bahwa asal usul kedua bahan peledak (bom) dan bahan kimia beracun masing-masing dihubungkan dengan masa pendudukan Tentara Jepang di Indonesia di awal periode tahun 1940-an dan mulai meningkatnya ekspor komoditas hasil laut baru berasosiasi terumbu karang (ikan kerapu, dan lobster) ke Hongkong, Singapura, dan Jepang sejak awal periode tahun 1980-an. Keterangan yang tak kalah pentingnya ialah yang menceritakan pola-pola pemanfaatan

1 Fokus-fokus kajian seperti itu dilakukan antara lain oleh Kuurt Tauchmann (1994); Horst H. Liebner (2005); Kazufumi (1997); dan Akimichi (1991).

2 Penelitian yang melaporkan praktik-praktik nelayan Bajo di kawasan terumbu karang Sulawesi Selatan antara lain ialah laporan dari Lampe dkk. (1997/1998; 2000/2001).

sumber daya perikanan oleh komunitas Nelayan Bajo masa sebelum periode 1950-an yang dicirikan dengan teknik tradisional arif lingkungan dan kelimpahan hasil tangkapan yang terkait dengan tatanan kehidupan kolektif yang mantap. Dari sini muncul pertanyaan pokok, bagaimana mengkonstruksi kompleksitas interaksi antara komunitas Nelayan Bajo dan lingkungan lautnya dalam konteks sistem kepercayaan, institusi sosial-ekonomi dan politik di masa awal keberadaan mereka di Kawasan Takabonerate hingga periode 1940-an? Berikut (2) pendekatan atau model analisis bagaimana yang sesuai dan tepat dikembangkan dalam rangka studi tersebut?

Tulisan ini bertujuan menganalisis kompleksitas interaksi komunitas Nelayan Bajo masa lalu dengan lingkungan lautnya yang mewujud dalam pola-pola pemanfaatan sumber daya terumbu karang dengan menerapkan paradigma komunalisme ekologi manusia. Dari sisi akademik, kajian tentu membuka peluang pengembangan pendekatan atau model analisis baru dalam ekologi manusia dalam rangka konstruksi model-model tatanan (paradigma) pemanfaatan sumber daya laut Kawasan Takabonerate dari masa ke masa hingga menjadi taman nasional seperti sekarang. Dari sisi terapan, hasil kajian akan memberikan manfaat bagi proses implementasi dan keberhasilan program Coremap melalui upaya penyempurnaan atau modifikasi model-model pengelolaan berbasis masyarakat (*community-based management*), kerja sama masyarakat dan pemerintah (*co-management*), dan kemitraan semua pihak pemangku kepentingan/*stakeholders* (*integrated management*) ke depan.

Material penulisan diambil dari data/informasi penelitian lapangan terutama yang diperoleh melalui wawancara mendalam—sesuai dengan fokus studi dan pilihan pendekatan—yang dilakukan di tahun 1997/1998, 2000/2001, dan 2004. Lokasi penelitian meliputi seluruh Kawasan Takabonerate dengan desa pulau-pulau yang berpusat di Pulau Rajuni yang menjadi pusat Kerajaan Masyarakat Bajo masa lalu.

Studi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan dan Pendekatan Konstruksionisme

Dari pemeriksaan literatur dan hasil-hasil penelitian lapangan tentang perilaku interaksi komunitas-komunitas nelayan dengan lingkungan lautnya pada berbagai tempat di dunia, terutama di negara-negara sedang berkembang, telah ditemukan fenomena kompleksitas yang mencolok, bahkan dalam banyak segi melebihi yang mencirikan hubungan-hubungan ekologi masyarakat manusia yang memanfaatkan sumber daya alam di darat. Sekurangnya terdapat lima kategori fenomena kompleksitas interaksi komunitas nelayan dengan lingkungan lautnya. Pertama, kompleksitas dalam diversitas tipe dan variasi serta perubahan dan kontinuitas bentuk-bentuk teknologi penangkapan ikan. Kedua, kompleksitas bentuk atau sifat interaksi manusia dengan lingkungan seperti hubungan antar subjektif yang dicirikan dengan keselarasan atau keseimbangan; hubungan ekologi manusia menguasai alam dengan berbasis pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kapitalisme, industrialisme, dan pasar bebas; dan hubungan ekologi yang melindungi terjaganya kondisi keseimbangan ekosistem dari perlakuan manusia dengan menempatkan birokrat dan para ilmuwan sebagai subjek pengelola dan pelindung. Ketiga, kompleksitas dalam kaitan fungsional antar pranata (sosial-ekonomi, politik, religi, kesenian) dalam sebuah komunitas yang dikaji. Keempat, kompleksitas intervensi dan interaksi antar pihak *stakeholders* dengan latar belakang berbeda-beda dalam kebijakan eksploitasi, pemasaran, pengamanan, dan sebagainya. Kelima, kompleksitas dalam bentuk-bentuk hak penguasaan wilayah perikanan (mencakup hak-hak penguasaan komunal (*communal property right*), penguasaan individual/keluarga (*individual/family property right*), penguasaan negara (*state property right*), pemanfaatan secara terbuka (*open access/use*)—kompleksitas fenomena terakhir m e nin-

gkat ketika suatu daerah perikanan (*fishing grounds*) mengandung dan berlaku berbagai bentuk hak penguasaan secara berlapis-lapis di dalamnya.

Fenomena interaksi komunitas nelayan dengan lingkungan lautnya menjadi lebih kompleks ketika kajian diperluas pada konteks pengaruh faktor eksternal serta konsekuensi lingkungan dan sumber daya laut (positif atau negatif) ditimbulkannya. Kalau demikian halnya, lalu bagaimana mungkin fenomena kompleksitas hubungan ekologi lingkungan laut seperti ini dapat dikaji dan dengan pendekatan apa dalam ekologi manusia yang relevan dan tepat diterapkan?

Untuk kajian tersebut, memang sulit menentukan suatu pendekatan atau model analisis yang aplikatif, sebab pada satu sisi pendekatan-pendekatan ekologi manusia lama telah mendapatkan kritikan karena banyak mengajukan asumsi-asumsi yang dinilai lebih bersifat ideal/esensial, totalitas, etik, dan apriori yang kurang mampu menjelaskan fakta secara empirik (Vayda dalam Borofsky, 1994: 320-327). Secara kronologis-historik, pendekatan-pendekatan tersebut mulai dari determinisme alam (*geographical determinism*) yang mengasumsikan faktor-faktor geografi dan lingkungan alam sebagai penentu mutlak bagi bentuk budaya atau menjadikan variabel-variabel lingkungan alam untuk menjelaskan aspek-aspek tertentu dari budaya manusia; neofungsionalisme dengan asumsi keseimbangan (*equilibria*) dari ekosistem-ekosistem tertutup yang dapat mengatur dirinya sendiri (*self-regulating system*); materialisme budaya (*cultural materialism*)—pendekatan ini berasosiasi dengan ekosistemik—dengan pertimbangan *cost-benefit*; dan ekologi Darwinisme dengan asumsi *optimal fitness* dalam respons/adaptasi untuk *survival*.

Demikian halnya pendekatan-pendekatan baru yang sedikit atau banyak tidak luput dari kekurangan atau kelemahan yang justru muncul dari fokus kajian dan pendekatan yang spesifik sebagai salah satu karakteristik ilmiah.

Misalnya, Prins (1965; 1985) melihat manusia dan lingkungan lautnya sebagai komponen ekosistem dengan media pelayaran, penangkapan ikan, dan teknologi kelautan, pada gilirannya mereproduksi sikap kepribadian budaya kebarharian seperti pragmatisme, instrumentalisme, adaptif, dan lain-lain. Pendekatan strategi adaptif, McCay (1978) dan Acheson (1981) melihat berbagai masalah utama yang dihadapi nelayan dan berbagai macam strategi yang mereka gunakan dalam mengatasinya dan memanfaatkan sumber daya lingkungan laut yang ada. Pendekatan masalah praktis lingkungan dari Milton (dalam Osseweijer, 2001), yang penekanannya bukan hanya pada kajian praktik interaksi manusia dengan lingkungannya dalam konteks budaya, tetapi juga keterlibatan peneliti dalam aksi-aksi pemberdayaan masyarakat yang menjadi korban kerusakan lingkungan dan kemerosotan sumber daya laut akibat kebijakan pemerintah yang keliru. Pendekatan aksi dan konsekuensi dari Vayda (diterapkan oleh Lampe, 2006) menjelaskan aksi-aksi manusia pemanfaat lingkungan laut dalam konteks sosial budaya internal dan eksternal dan konsekuensi lingkungan (positif atau negatif) ditimbulkan. Pendekatan ekologi politik yang diterapkan oleh McGoodwin (1990) melihat proses-proses politik dari negosiasi individu sampai pada kekuatan-kekuatan politik dunia yang berpengaruh secara signifikan terhadap aksi-aksi eksploitasi lingkungan laut dan konsekuensi negatif ditimbulkannya.

Pada satu sisi, diakui bahwa aplikasi dari setiap pendekatan tersebut tentu telah memberikan kontribusi berarti bagi pengembangan kajian ekologi manusia sekaligus bagi perspektif teori antropologi yang menjadi landasannya. Meskipun demikian, pada sisi lainnya, dengan sikap ilmiah konsisten dan fokus pada fenomena empirik tertentu seringkali tidak melihat atau sengaja mengabaikan berbagai komponen yang tampaknya di luar fokus tetapi pada esensinya merupakan satu kesinambungan dari proses dinamika yang dikaji (Lampe, 2009: 60).

Setelah melakukan review literatur ekologi

manusia secara meluas berkaitan studi pola-pola praktik ekonomi nelayan, pada akhirnya saya menilai bahwa pendekatan konstruksionis (dengan tiga paradigma) yang dibangun oleh Gisli Palsson (1999) dapat diterapkan dan dikembangkan hingga pada tataran tertentu dalam studi pola pemanfaatan sumber daya laut terumbu karang Takabonerate oleh Masyarakat Bajo masa lalu.

Gisli Palsson (1991, 1996: 16) membangun pendekatan konstruksionisme dalam studi ekologi manusia (dengan tiga paradigma lingkungan) sebagai model pemolaan kompleksitas ciri interaksi masyarakat nelayan Islandia (dengan sistem pemaknaan simbolik metaforik) dengan lingkungan lautnya yang berlangsung dari masa sebelum kolonialisme ke masa modernisasi yang ditandai dengan industrialisasi, kapitalisme, dan kemajuan pasar ekspor dunia, hingga masa kemerdekaan yang dicirikan dengan dominasi kebijakan pemerintah (mengandalkan kepakaran saintis) dalam rangka pemulihan keseimbangan sumber daya laut di negara itu. Ketiga paradigma tersebut ialah orientalisme, paternalisme, dan komunalisme, yang dibangun berdasarkan pada etnoepistemologi, jadi berada pada kutub berlawanan dengan dualisme Cartesian sebagai konstruksi jaman pencerahan. Dengan kedua orientalisme dan paternalisme, manusia dianggap sebagai penguasa dan pemilik (*master*) terhadap alam (*nature*). Bedanya karena yang pertama ‘mengeksplorasi’ (*exploits*) dan mendominasi melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, sedangkan yang kedua ‘melindungi’ (*protects*) melalui kebijakan pemerintah atas bantuan para konsultan dari kalangan saintis dan ekonom. Komunalisme berbeda dengan kedua paradigma tersebut pertama, karena paradigma ini menolak perbedaan dan pemisahan ekstrim antara alam dan masyarakat dan antara ilmu pengetahuan dan pengetahuan praktis.

Paradigma komunalisme menggambarkan ciri hubungan kebersamaan atau kesatuan masyarakat nelayan dengan lingkungan lautnya, hubungan keseimbangan, hubungan intersubjektif manusia-lingkungan, sumber daya laut dipahami sebagai pemberian dari alam dan subjek-subjek penguasa laut (dewa, Tuhan, raksasa, roh-roh nenek moryng, hantu-hantu laut, kekuatan supernatural), kepercayaan terhadap mimpi, bisikan makhluk halus, intuisi, firasat, perasaan dan tanda-tanda gaib sebagai simbol media komunikasi manusia dengan subjek lingkungan, ada aturan/norma tradisional sebagai acuan keputusan dan tindakan. Paradigma komunalisme juga menggambarkan ciri sistem ekonomi masyarakat nelayan yang subsisten dengan teknologi sederhana yang arif lingkungan. Paradigma komunalisme, menurut Palsson, dibangun untuk merekonstruksi kompleksitas kehidupan masyarakat nelayan yang selalu berlangsung dalam tahap awal sejarah perkembangan budaya yang terus-menerus.

Setelah mencermati kompleksitas ciri dari setiap paradigma dan data berciri etnografi Orang Bajo dari Kawasan Takabonerate, dinilai bahwa paradigma komunalisme lingkungan memungkinkan diaplikasi dan dikembangkan dalam studi pemanfaatan sumber daya lingkungan laut berasosiasi terumbu karang masa lalu di kawasan tersebut. Adapun kedua paradigma lainnya (orientalisme dan paternalism) terasa sulit diterapkan disebabkan kehidupan masyarakat dan pola-pola pemanfaatan sumber daya laut menunjukkan kerumitan dari kehadiran berbagai ciri yang di sana sini justru sekaligus mencerminkan ketiga paradigma tersebut. Dengan demikian dalam rangka konstruksi paradigm-paradigma lingkungan lanjutan dalam rangka studi fenomena perubahan sosial budaya dan hubungan-hubungan ekologi yang semakin rumit di masa Orde Baru dan Era Reformasi sekarang ini diperlukan kajian literatur yang cermat dan penelitian lapangan lanjutan, khususnya di Kawasan Takabonerate.

Setting Lokasi, Penduduk, Etnis, dan Mata Pencaharian

Orang Bajo yang dijadikan kasus dalam penulisan paper ini ialah kelompok-kelompok masyarakat Bajo yang sejak dahulu mendiami kawasan Taka Bonerate, Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan. Taka Bonerate (menjadi Taman Laut Nasional awal periode 1980-an) merupakan kawasan terumbu karang atol yang unik dan menarik. Atol yang terdiri dari gugusan pulau-pulau gosong karang dan rataan terumbu yang luas dan tenggelam membentuk pulau-pulau dengan jumlah banyak. Di antara pulau-pulau dan gosong karang (taka dalam istilah Bugis, Makassar, Bajo) terdapat selat-selat sempit yang dalam dan terjal, sedang pada bagian rataan terumbu karang (disebut juga *taka*) banyak terdapat kolam-kolam kecil yang dalam dan dikelilingi terumbu karang. Perairan Kawasan Takabonerate, khususnya pada takat-taka dikenal sangat kaya dengan jenis-jenis karang dan jenis-jenis sumberdaya perikanan berasosiasi dengannya (ikan, kerang, lobster, teripang, belut laut, cumi-cumi, kepiting, dan sebagainya). Pada saat air surut terendah, rataan karang tampak seperti daratan kering yang diselingi kolam-kolam kecil. Karena sulitnya pendatang baru berlayar masuk dan ke luar dari Kawasan Takabonerate sehingga di masa lalu kawasan tersebut dinamai Kepulauan Macan.

Penduduk Bajo berdiam di desa pulau-pulau seperti Rajuni, Latondu, Tarupa, Jinato, Pasitallu Tengah dan Pasitallu Timur. Perlu dicatat bahwa hanya penduduk Jinato yang sedikit Orang Bajo-nya. Di samping Orang Bajo, Orang Bugis merupakan penduduk mayoritas dan dominan. Bagian kecil dari penduduk kawasan Taka Bonerate berasal dari Selayar (biasanya mengaku orang Makassar) dan pulau-pulau sekitar seperti Kayuadi, Jampea, dan Bonerate, yang mereka itu adalah etnis Bajo dan Bonerate sendiri. Jumlah keseluruhan penduduk sebanyak 4527 jiwa, terdiri dari 2231 laki-laki dan 2296 perempuan (Sumber: Kantor Kecamatan Pasitallu, 2003).

Sejak dahulu kala, menurut keterangan setempat, mata pencaharian penduduk Kawasan Takabonerate dan pulau-pulau sekitarnya terpusat pada sektor perikanan laut dengan menggunakan berbagai tipe alat tangkap dan perahu tradisional. Di masa lalu hingga periode 1950-an, kehidupan sosial ekonomi dan politik masyarakat Kawasan Takabonerate yang mayoritas Bajo dikelola secara rapi dan mantap di bawah sebuah kelembagaan tradisional yang dikenal dengan “Panglima Menteng”.

Pengelolaan Pemanfaatan Sumber Daya Laut Takabonerate dalam Tatanan Kelembagaan Panglima Menteng

Di bulan Mei 2001, saya bersama anggota tim penelitian sosial ekonomi Coremap melakukan wawancara mendalam dengan beberapa informan dari kalangan tokoh Masyarakat Bajo di Kawasan Takabonerate dalam rangka program optimasi zonasi Taman Nasional Takabonerate. Melalui cerita Ar (laki-laki 67 tahun), saya memperoleh keterangan bahwa pengelolaan pemanfaatan sumber daya laut dalam kawasan tersebut di masa lalu berada di bawah kelembagaan tradisional Panglima Menteng yang dipimpin oleh para *pongawa* yang berpusat di Rajuni. Kawasan Takabonerate, menurut keterangan, pada mulanya bukan merupakan wilayah bebas untuk dimasuki dan dimanfaatkan oleh siapa saja sebagaimana terjadi kemudian di periode 1960-an hingga seterusnya. Dari setiap desa (pulau berpenghuni) dalam kawasan tersebut diperoleh keterangan tentang adanya lokasi-lokasi terumbu karang (*taka*) yang dipercayai oleh warga masyarakat ada makhluk halus/roh-roh penunggunya yang menyebabkan nelayan harus berdo'a atau permissi sebelum masuk ke lokasi-lokasi tersebut. Pada intinya, sistem tradisional pengelolaan pemanfaatan sumber daya laut di bawah kelola kelembagaan Panglima Menteng diceritakan oleh informan Ar sebagai berikut.

Dahulu kala di masa kolonial dan sebelumnya, wilayah Kawasan Takabonerate adalah milik masyarakat kawasan sendiri. Mereka pada umumnya adalah orang keturunan Bajo asli, peranakan Bajo-Bugis, Bajo-Selayar/Makassar, dan Orang Bonerate. Sistem ekonomi perikanan yang merupakan mata pencaharian pokok, berada di bawah pengaturan para ponggawa laut yang mengatur tentang: jenis-jenis sumberdaya laut yang boleh diambil, jadwal/waktu-waktu pengambilan, alat yang digunakan, lokasi-lokasi operasi, dan lain-lain. Misalnya: periode bulan 7-8 nelayan mengambil kima dan jenis-jenis kerang lainnya; bulan 9-12 sebagian besar nelayan memancing, sebagian menggunakan pukat dan jaring; bulan 11-12 (hanya 1 bulan) adalah musim menyelam mengambil teripang; dan, bulan 1-5 (kecuali bulan 4) merupakan musim pancaroba, waktu berlangsungnya goncangan laut tak henti-hentinya dan sangat berbahaya, sehingga nelayan pada umumnya tinggal di darat memperbaiki alat-alat tangkap. Hasil tangkapan nelayan, oleh Ponggawa Laut (pemimpin kelompok nelayan) diserahkan kepada Ponggawa Iolo (pemimpin keturunan bangsawan Bajo Asli), yang dapat dianalogikan dengan pengelola koperasi pada masa sekarang. Oleh Ponggawa Iolo hasil-hasil laut tersebut dibagi-bagikan kepada pedagang lokal dan seterusnya mereka jual ke luar, seperti ke Bulukumha, Bantaeng (Pulau Sulawesi), dan tempat-tempat lainnya. Penunjukan orang menjadi pedagang lokal biasanya berdasarkan kesepakatan di antara Ponggawa Iolo, Ponggawa Laut, dan para kepala kampung. Di atas semuanya berkedudukan seorang kepala pemerintahan puncak bergelar 'Panglima Menteng' yang dapat disederajatkan dengan presiden sekarang ini. Siapa-siapa yang melanggar, khususnya berkaitan dengan sistem penangkapan dan pemasaran hasil laut, akan diberikan sanksi berupa teguran, denda, dan sebagainya, tetapi pada kenyataannya jarang sekali terjadi kasus-kasus pelanggaran.

Ciri-ciri pengelolaan pemanfaatan sumber daya laut Kawasan Takabonerate masa lalu yang hingga kini masih terlihat sisa-sisanya

juga berupa keyakinan masyarakat nelayan tentang adanya tempat-tempat keramat di laut yang dijaga oleh roh-roh halus (hantu, jin) dan benda-benda kuno yang mengandung kekuatan supernatural. Cerita Kepercayaan tersebut di masa lalu sangat diyakini masyarakat lokal dan menjadi pedoman utama baginya melakukan aktivitas penangkapan ikan. Sebagai contoh, *taka-taka* Kayu Bulan, Balaloong, dan Kumai, menurut cerita Orang Pasitallu dan Jinato adalah angker karena adanya jin dan hantu-hantu laut. Makhluk-makhluk alam ini menurut cerita, biasanya menjebak nelayan dengan memunculkan jenis-jenis tangkapan bernilai ekonomi tinggi, seperti teripang hitam, kerang mutiara, dan lain-lain dalam jumlah banyak. Nelayan yang gegabah dan langsung mengambilnya tanpa meminta izin akan menjadi korban kesakitan atau mati di tempat. Sama halnya *taka-taka* Meriam dan Belanda yang dijaga oleh roh-roh orang asing yang meninggal di masa kolonial. Roh-roh tersebut harus dihindari atau dibujuk dengan perlakuan-perlakuan tertentu.

Demikian halnya bagi masyarakat nelayan bagian utara kawasan, khususnya Tarupa, beberapa lokasi penangkapan, terutama Taka Gantarang dengan keramik kembar kunonya, merupakan lokasi sangat keramat. Keangkeran lokasi ini menurut cerita nelayan, bukan hanya dari kekuatan supernatural keramik kunonya, tetapi juga karena dijaga seekor gurita raksasa. Siapa pun yang berniat jahat hendak mengambil keramik karena menilainya sebagai harta karun, dipastikan orang tersebut nantinya terkena musibah. Jangankan sudah menyentuh mulut tembikar, baru saja memasuki lokasi tempat tembikar itu, orang-orang yang berniat jahat pasti merasakan ancaman musibah yang bakal terjadi berupa keram, pingsang, yang bias berakhir kematian. Karena kepercayaan tersebut telah menyebar luas dalam Masyarakat Takabonerate, tidak ada seorang pun berani mencoba mendekati, apalagi menyentuh benda kuno tersebut. Hingga akhir-akhir ini, orang-orang yang masih mempercayai adanya tempat-tempat dan benda-benda kuno yang

keramat harus meminta izin (dengan praktik ritual) kepadanya sebelum melakukan aktivitas penangkapan ikan.

Dari Latondu dan Rajuni juga diperoleh cerita tentang adanya lokasi-lokasi angker di laut yang dijaga makhluk-makhluk halus. Di tempat-tempat tersebut menurut cerita, sudah sering nelayan hilang, termasuk dua orang pencari gurita yang hilang di pantai pada saat air laut surut. Itulah sebabnya menurut orang setempat, sebelum turun ke laut orang harus berdoa dahulu untuk meminta keselamatan dan risiko dari Tuhan Allah. Dengan doa yang ditujukan kepada-Nya, keangkeran benda kuno dan serangan gurita raksasa serta kekuatan makhluk-makhluk alam bisa dijinakkan dalam rangka memanfaatkan sumber daya laut di tempat-tempat keramat. Bagi Nelayan Bajo Kawasan Takabonerate pada umumnya, hasil laut diyakini sebagai risiko dari Tuhan yang diperoleh berkat usaha keras dan doa.

Dari penelitian sosial ekonomi (1997/1998) dan pola pemanfaatan sumber daya laut dalam rangka optimasi zonasi Takabonerate (2001) yang keduanya dilakukan dalam rangka Coremap, diperoleh keterangan dari nelayan setempat bahwa *taka-taka* dan bagian-bagian pulau Kawasan Takabonerate yang dipercayai keramat, kondisi karangnya banyak yang utuh, demikian halnya spesies-spesies yang hidup di situ (ikan, kerang, teripang, lobster, cumi-cumi, kepiting, dan lain-lain) masih selalu lebih baik daripada di lokasi-lokasi lainnya yang dianggap tidak keramat.

Gambaran kompleksitas fenomena kehidupan sosial-ekonomi dan politik serta interaksi manusia dengan lingkungannya yang dicirikan dengan kepercayaan-kepercayaan dalam kerangka Kelembagaan Panglima Menteng, demikian halnya yang masih tersisa hingga kini dalam Kawasan Takabonerate ternyata menunjukkan banyak kesamaan dengan ciri-ciri paradigma komunalisme lingkungan dari Gisli Palsson.

Kelembagaan Panglima Menteng dan Paradigma Komunalisme Masyarakat Bajo

Dari pemahaman akan kompleksitas fenomena interaksi Masyarakat Nelayan Bajo dengan lingkungan laut terumbu karang Kawasan Takabonerate di bawah pengelolaan Kelembagaan Panglima Menteng yang menunjukkan banyak kesamaan dengan ciri-ciri paradigma komunalisme dari Gisli Palsson, maka menjadi mungkin mengonstruksi sebuah paradigma yang tepat disebut Paradigma Komunalisme Lingkungan Masyarakat Bajo masa lalu (selanjutnya disingkat Komunalisme Lingkungan Masyarakat Bajo).

Untuk kemanfaatan ilmiah, Paradigma Komunalisme Bajo digunakan sebagai model penyederhanaan dalam menganalisis dan menggambarkan sifat kompleksitas fenomena interaksi manusia dengan lingkungan lautnya dalam konteks yang luas (sosial-ekonomi, politik, kebersamaan dengan lingkungan, kepercayaan). Melalui pendekatan konstruksionis (model analisis), kompleksitas fenomena tersebut dapat disederhanakan (untuk pemahaman) ke dalam delapan konstruksi asumsi dan ciri yang saling sesuai, yaitu (1) kelembagaan sosial-ekonomi dan politik (Panglima Menteng) sebagai kelembagaan yang mencakup semua bidang kehidupan (*total institution*), (2) pelembagaan kepemilikan komunal atas wilayah perikanan kawasan terumbu karang, (3) akses keterlibatan masyarakat secara meluas terhadap pemanfaatan sumber daya laut, (4) pengaturan waktu aktivitas eksploitasi sumber daya perikanan, (5) tipe teknologi tangkap tradisional yang arif lingkungan, (6) hubungan pasar eksternal dan kelembagaan kerjasama ekonomi (koperasi nelayan), (7) tipe ekonomi subsisten, dan (8) hubungan antar subjek manusia dan roh-roh penguasa dan kekuatan supernatural di laut. Setiap konstruksi mengandung ciri dan asumsi dan penjelasan relasional, fungsional, dan bermakna simbolik-metaforik yang pada gili-

rannya menyumbang pada kondisi terjaganya tatanan kehidupan kolektif yang mantap, kondisi keseimbangan pemanfaatan sumber daya laut, dan kelestarian ekosistem terumbu karang dalam Kawasan Takaboneate di masa lalu.

Membandingkan Komunalisme Lingkungan Masyarakat Bajo dengan Komunalisme Lingkungan Nelayan Islandia, tampak bahwa paradigma komunalisme pertama lebih kaya akan konstruksi fenomena daripada paradigma komunalisme kedua. Dapat diduga kalau Gisli Palsson (*constructivist*) sengaja fokus pada konstruksi fenomena hubungan antar subjektif manusia dengan lingkungan laut kalau bukan karena fenomena seperti mencirikan tatanan Kelembagaan Panglima Menteng memang tidak ada dalam kehidupan Masyarakat Nelayan Islandia. Khusus tentang ketidakhadiran fenomena pasar, bagaimana mungkin hasil laut tidak dipasarkan. Padahal semua nelayan (tradisional atau modern), terutama mereka yang menjadikannya aktivitas itu sebagai sumber pendapatan utama rumah tangga, pasti menjual hasil tangkapannya di pasar lokal atau pasar regional dan hasil jualannya dimanfaatkan bagi pemenuhan berbagai kebutuhan rumah tangganya. Dari perspektif holistik—mendasari semua pendekatan ilmiah dan cara kerja antropolog--pranata-pranata sosial, pasar, dan sebagainya semestinya diperhitungkan karena selalu menjadi konteks dari perilaku atau teknik yang mau dijelaskan atau digambarkan. Diasumsikan pula bahwa hasil tangkapan ikan sebagai barang pertukaran (*exchange product*) itulah yang menjadikan semua masyarakat nelayan di dunia (tradisional atau modern) menjadi masyarakat terbuka. Oleh karena itu, suatu paradigma lingkungan, sekalipun komunalisme lingkungan tradisional semestinya memodeli fenomena sosial-budaya dan ekonomi, termasuk pranata pasar, yang terkait secara signifikan dengan interaksi manusia dengan lingkungannya.

Berbeda halnya dengan konstruksi-konstruksi lainnya, konstruksi fenomena hubun-

gan antar subjektif komunitas nelayan dan roh-roh penguasa alam atau benda-benda kuno berkekuatan supernatural yang mencirikan Komunalisme Lingkungan Masyarakat Bajo justru sangat nyata persamaannya dengan komunalisme lingkungan di Islandia. Bahkan komunalisme lingkungan yang dikembangkan di Kawasan Taka Bonerate bisa lebih kaya, misalnya Orang Bajo memaknai laut sebagai ruang mencari sumber nafkah/rizki yang tak habis-habisnya, ruang tempat tinggal manusia yang luas, dunia persemayaman roh-roh nenek moyang Orang Bajo (dipercayai bisa mengelilingi perairan dunia tujuh kali dalam sehari, laut sebagai kawan/sahabat, dan laut sebagai obat (bandingkan dengan Sukmawati, 2004).

Adapun ikan-ikan atau jenis-jenis biota laut lainnya yang disebutkan sebagai makhluk atau subjek berkeinginan yang jarang sekali ditemukan dalam Komunalisme Lingkungan Masyarakat Nelayan Islandia, justru banyak mencirikan paradigma komunalisme yang dikembangkan di Kawasan Takabonerate. Fenomena personifikasi atau humanisasi makhluk laut berupa ikan seperti ini pernah diceritakan oleh seorang Nelayan Bajo pemancing (bahasa diredaksi ulang oleh penulis) sebagai berikut.

Ikan-ikan sendiri bukan binatang tangkapan semata yang tidak berdaya. Ikan-ikan mempunyai pikiran, perasaan, kehendak, dan sikap menolak yang hanya bisa diperoleh ketika mereka memang sudah ikhlas karena ucapan dan bujukan yang baik oleh nelayan. Itulah sebabnya, meskipun nelayan memancing pada lokasi-lokasi yang diketahuinya sebagai sarang-sarang ikan (batu dalam istilah lokal), namun nelayan tidak begitu saja mudah memperoleh sejumlah tangkapan yang diinginkan karena ikan-ikan tidak mau makan umpan yang disajikan kepadanya. Nelayan, karena itu, harus senantiasa bersikap sabar dalam penantian sementara melakukan negosiasi dan bujukan lewat media pancing dengan umpannya. Berbeda halnya dengan praktik nelayan

bius dan bom yang dalam waktu sesaat dapat memperoleh hasil melimpah karena memahami dan memperlakukan lingkungan dan sumberdaya laut sebagai objek bagi kepentingan subjek manusia semata.

Sebetulnya prinsip komunalisme dari Palsson dapat ditemukan pula pada kelompok-kelompok masyarakat berburu, termasuk pemburu ikan di laut atau sungai. Bahan-bahan etnografi dari Nayaka (di India Selatan), Mbuti Pygmie (di Zaire) dan Batek (Malaysia) dari Bird David (dalam, Descola dan Palsson, 1999) misalnya menyatakan bahwa para pemburu-peramu memahami lingkungannya sebagai 'pemberian' (giving). Mereka meyakini bahwa lingkungannya senantiasa memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan memberi kebebasan bagi mereka tanpa pembebanan kewajiban pengembalian oleh subjek lingkungan. Lingkungan dianggap sebagai 'orangtua' (*parent*) dan pemburu-peramu yang tinggal di hutan mematuhi lingkungan menjadi orangtua yang menyediakan. Ossewiler (2001) juga menemukan bagaimana nelayan Pulau Seram (Maluku) membagi lingkungan hidup menjadi dua bidang kehidupan secara simbolik metaforik: lingkungan perairan depan pulau yang disimbolkan sebagai arena interaksi dengan dunia luar sehari-hari dan lingkungan perairan bagian belakang tempat menangkap ikan sehari-hari yang disimbolkan sebagai arena interaksi/pergaulan antar komunitas manusia/anak cucu yang masih hidup dengan komunitas roh-roh nenek moyang yang menciptakan adat-istiadat atau norma/tatacara pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan dan lestari.

Referensi

Acheson, James, M.

1981 "Anthropology of Fishing." In Bernard J. Siegel, Alan R. Beals dan Stephen A. Tyler (Peny.). *Annual Review of Anthropology*. Vol. 10 : 275-316, Palo Alto.

Akimichi, Tomoya.

1991 "Coastal Foragers in Transition," *Senri Ethnological Studies* 42. National Museum of Ethnology.

Penutup

Mengungkap perspektif dan pola pengelolaan laut/SDA terumbu karang masyarakat Bajo Takabonerate dengan paradigma komunalisme bukan sekedar romantisasi masa lalu yang hilang atau terkikis, melainkan mau merekonstruksi paradigma ilmiah yang dapat menggambarkan tahap dan proses awal dari kompleksitas interaksi masyarakat bahari Bajo dengan lingkungan lautnya yang memang pernah menjadi kenyataan. Sebetulnya aplikasi paradigma komunalisme dari Palsson tidak sepenuhnya relevan dalam menggambarkan kompleksitas interaksi komunitas nelayan dengan lingkungan sumber daya laut (berasosiasi terumbu karang) dalam konteks sosial ekonomi dan politik kelembagaan Panglima Menteng yang sudah melihat hubungan eksternal.

Dari sisi akademik, diharapkan kajian akan membuka peluang pengembangan suatu model analisis atau paradigma baru yang aplikatif dalam studi ekologi manusia/antropologi ekologi di Indonesia dalam rangka memahami pola-pola pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam perairan kawasan terumbu karang di masa lalu, masa sesudahnya, dan hingga menjadi taman nasional seperti sekarang. Dari sisi terapan, hasil kajian akan memberikan manfaat bagi implementasi program Coremap melalui upaya penyempurnaan atau modifikasi paradigma pengelolaan berbasis masyarakat (*community-based management*), kerja sama pihak-pihak masyarakat dan pemerintah (*co-management*), dan kemitraan dengan pelibatan secara aktif semua pihak pemangku kepentingan (*integrated management*) ke depan.

Descola, Philippe dan Gisli Palsson

1999 *Nature and Society: Anthropological Perspectives*. Routledge, London, New York.

Lampe, Munsu

2004 *Konstruksi Perilaku Hubungan Komunitas Nelayan Taka Bonerate dengan Lingkungan Lautnya Sebelum dan Sesudah Menjadi Taman Nasional*. Hasil Penelitian dibiayai oleh Proyek Pengkajian dan Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional Indonesia.

Lampe, Munsu

2005 "Perilaku Eksploitasi Sumberdaya Perikanan Taka dan Konsekuensi Lingkungan dalam Konteks Internal dan Eksternal: Studi Kasus Pada Nelayan Pulau Sembilan". *Jurnal Humaniora (Budaya Sastra dan Bahasa)* 17(3) Yogyakarta: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada.

Lampe, Munsu

2009 "Penganekaragaman dan Penyeragaman dalam Dinamika Usaha Penangkapan Ikan Kawasan Terumbu Karang: Sebuah Penjelasan Prosesual dan Kontekstual," *Jurnal Antropologi Indonesia*, No. 1 Januari- April 2009.

Lampe, Munsu, Darmawan Salman, dan Ramli A.T

1997/1998 Studi Analisis Sosial-Coremap Provinsi Sulawesi Selatan. *Laporan Penelitian*, Universitas Hasanuddin-PT-LIPI Jakarta, Proyek Dibiayai Bank Dunia.

Lampe, Munsu, Mardiana, dan Ramli A.T

2000/2001 Studi Pemanfaatan Sumberdaya laut dalam Rangka Optimasi Zonasi taman Nasional Taka Bonerate. *Laporan Penelitian*. Universitas Hasanuddin Bekerjasama Coremap LIPI, Jakarta.

Lapian, Adrian B. dan Ngatsu Kazufumi

1997 *Research on Bajau Communities: Maritime People in Southeast Asia*. Dipresentasikan dalam acara Widyakarya Nasional Antropologi dan Pembangunan di Hotel Indonesia 26-28.

Liebner, Horst

2005 "Empat Versi Lisan Cerita Leluhur Orang Bajo di Selayar Selatan," dalam *Tapak-Tapak Waktu*, Makassar: Innawa.

McCay, Bonnie J.

1978 "System Ecology, People Ecology, and the Anthropology of Fishing Communities." *Human Ecology*. 6(4): 397-422.

McGoodwin, James R

1990 *Crisis in the World's Fisheries: People, Problems, and Politics*, Stanford, California: Stanford University Press.

Osseweijer, Manon

2001 *Taken at the Flood: Marine Resource Use and Management in the Aru Islands (Maluku, Eastern Indonesia)*. Ph.D Dissertation for Universiteit Leiden, Nederland.

Palsson, Gisli

1991 *Coastal Economies, Cultural Accounts: Human Ecology and Icelandic Discourse*, Manchester University Press.

Palsson, Gisli

1996 "Human-Environmental Relations: Orientalism, Paternalism and Communalism" dalam Descola dan Palsson (Peny.) *Nature and Society: Anthropological Perspectives*. London, New York: Routledge.

Prins, A. H. K

1965 *Sailing From Lamu*, Assen Nederland: Van Gorcum.

Saleh, Sukmawati

1994 Pengetahuan Lokal Orang Bajo dalam Pengelolaan dan Pelestarian Sumberdaya Laut di Kelurahan Bajoe, Kec. Tanete Riattang Timur, Kab. Bone. Tesis Magister Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar.

Tauchmann, Kurt

1996 Research in Progress: Ecological Adaptation, Political Affiliation and Economic Oscillation Within Maritime Nomadism in Southeast Asia. Makalah dipresentasi pada Seminar Bajo di LIPI-Jakarta, 24-25 Juni.

Vayda, Andrew P

1994 "Actions, variations, and Change : Emerging anti Essentialist view in Anthropology". In R. Borofsky (Peny.), *Assesing Cultural Anthropology*. New York, St. Louis: McGraw Hill, Inc.

• Panduan Penulisan untuk Kontributor

Antropologi Indonesia diterbitkan dengan tujuan ikut mengembangkan ilmu antropologi sosial dan budaya di Indonesia. Jurnal ini menggunakan sistem mitra bebestari (*Peer-Review*) dalam proses pemilihan naskah yang akan diterbitkan. Redaksi menerima sumbangan artikel baik yang bersifat teoretis, maupun hasil penelitian etnografi. Karangan tersebut tidak harus sejalan dengan pendapat redaksi. Kriteria artikel yang dapat dimuat dalam jurnal ini dapat dipisah menjadi empat bagian. Pertama, adalah artikel hasil penelitian etnografi atau kualitatif mengenai topik tertentu yang berkaitan dengan kelompok etnik/kelompok sosial di Indonesia; Kedua, Hasil penelitian terapan, kolaboratif, dan juga hasil penelitian yang dihasilkan dari pengalaman keterlibatan penulis dengan masyarakat/komunitas, semisal program-program intervensi yang berhubungan dengan relasi kebudayaan, politik, lingkungan, dan pembangunan; Ketiga, adalah Pembahasan/diskusi mengenai teori/metodologi dalam ilmu antropologi atau ilmu-ilmu sosial lainnya yang berkaitan dengan diskursus teoritik di antropologi; dan terakhir adalah tinjauan buku terhadap buku teks antropologi atau ilmu-ilmu sosial lainnya. Buku yang dikaji berlaku untuk buku yang diterbitkan dalam 3 tahun terakhir untuk terbitan dalam negeri dan 5 tahun terakhir untuk terbitan luar negeri.

Artikel yang masuk masih akan disunting oleh Dewan Redaksi. Naskah dapat dikirimkan kepada Redaksi melalui email journal.ai@gmail.com dalam format program MS Word, spasi rangkap, dengan ukuran kertas letter dan margin normal. Panjang tulisan maksimal 5000 kata. Mohon agar disertakan abstrak maksimal 250 kata dalam bahasa Inggris dan sekaligus abstrak berbahasa Indonesia. Disertai dengan minimal tiga kata kunci dan maksimal enam kata kunci. Penulis juga diharapkan mengirimkan alamat kontak dan nomor telepon.

Sistematika penulisan harus dibuat dengan mencantumkan pendahuluan, pembahasan/ulasan (jika artikel bersifat teoritik/metodologi bagian ini adalah ulasan yang mendukung argumen di sub bab pertama), dan penutup/kesimpulan. Semua catatan dalam artikel hendaknya tersusun rapi dengan ketentuan penulisan ilmiah yang berlaku. Begitu pula dengan catatan kaki, agar ditulis di bagian bawah halaman, bukan pada bagian belakang artikel. Kemudian untuk daftar pustaka dibuat merujuk pada gaya penulisan AAA (American Anthropologist Association) Style, dengan beberapa modifikasi sebagaimana ditunjukkan pada contoh berikut abjad sebagai berikut:

Geertz, C.

- 1984 'Tihingan: Sebuah Desa di Bali', dalam Koentjaraningrat (peny.) *Masyarakat Desa di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Hlm. 246–274.

Koentjaraningrat.

- 1974 *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan.

Manoppo-Watupongoh, G.Y.J.

- 1995 'Wanita Minahasa', *Antropologi Indonesia* 18(51):64–74.

• Guidelines for contributors

Antropologi Indonesia was published to develop and enrich scientific discussion for scholars who put interest on socio-cultural issues in Indonesia. These journals apply peer-reviewed process in selecting high quality article. Editors welcome theoretical or research based article submission. Author's argument doesn't need to be in line with editors. the criteria of the submitted article covers the following types of article: first, the article presents the results of an ethnographic/qualitative research in certain topic and is related with ethnic/social groups in Indonesia; second, the article is an elaborated discussion of applied and collaborative research with strong engagement between the author and the collaborator's subject in implementing intervention program or any other development initiative that put emphasizes on social, political, and cultural issues; Third, a theoretical writing that elaborates social and cultural theory linked with the theoretical discourse of anthropology, especially in Indonesia anthropology; last, the article is a critical review of anthropological reference and other ethnography books that must be published at least in the last 3 years.

Submitted article will be selected and reviewed by editorial boards. The submission should be in soft copy format and must be sent to journal.ai@gmail.com in Ms Word file format, double spaces, with letter size paper. The length of the article should not exceed 5000 word. Please also attach abstract with maximum of 250 words length in English and Bahasa, and six keywords. Author should write their institution postal address and also the phone contact in first part of the article.

Article should meet the following structures: introduction, supporting data and the ground of author argument (for articles that are theoretical or methodological should include theoretical discussion and literature study), and conclusion. All references in the articles should be neatly put in a proper format. Footnotes should be written on the bottom part of every page, do not put them at the end of article. Bibliography should follow the AAA (American Anthropologist Association) Style, with some adjustment as follow:

Gilmore, D.

- 1990 *Manhood in the Making: Cultural Concepts of Masculinity*. New Haven and London: Yale University Press.

If it is a chapter in a book, or an article in a journal please give the title of book/journal and the page numbers. In the case of journal please give the Volume and issue number. e.g.

Geertz, C.

- 1980 'Tihingan: Sebuah Desa di Bali', in Koentjaraningrat (ed.) *Masyarakat Desa di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Pp.246–274.

Marvin, G.

- 1984 'The Cockfight in Andalusia, Spain: Images of the Truly Male', *Anthropological Quarterly* 57(2):60–70.

copyright © 2010

ANTROPOLOGI INDONESIA

Pusat Kajian Antropologi, Departemen Antropologi,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Indonesia

Lantai 1, Gedung B, Kampus Universitas Indonesia, Depok, 16424

Phone/Fax: +62 21 78881032 e-mail: journal.ai@gmail.com

Makna Kultural Mitos dalam Budaya Masyarakat Banten Ayatullah Humaeni	159
Kekuasaan Politik dan Adat Para Mosalaki di Desa Nggela dan Tenda, Kabupaten Ende, Flores J. Emmed M. Priyoharyono	180
Politik Etnisitas dalam Pemekaran Daerah Fikarwin Zuska	203
Pengelolaan Sumber Daya Laut Kawasan Terumbu Karang Takabonerate dan Paradigma Komunalisme Lingkungan Masyarakat Bajo Masa Lalu Munsi Lampe	216
Puisi Lisan Masyarakat Banda Eli Ketahanan Budaya di Maluku setelah Perang Pala Timo Kaartinen	228